COMMUNITY BASED CORRECTION: METODE ALTERNATIF MENGATASI OVERCROWDED

Noel Tua Lumban Tobing

PoltekNIK Ilmu PemasYarakatan Depok

email: noel_fsx@yahoo.co.id

Abstract

The emergence of the community based correction method begins with the practice of imprisonment which by many countries tends to be seen as the only type of punishment until the longer the prison conditions become overcrowded and actually have a worse impact on the perpetrators. The need for other alternative crimes to avoid more prison construction eventually gave birth to the CBC concept. In review from the SMS data of the director general of PAS laps in march 2020 the number of prison and remand center residents in indonesia was overovercrowded, with a total of 270,415 while its capacity was only 132,531. this proves that alternative crimes are necessary to reduce the number of prison and remand center residents. Community based correction is an alternative method of non-imprisonment which aims to re-assault the perpetrators into the community, in other words the perpetrators are not jailed but serve their sentences in the community so that the community can participate in the guiding process of convicted persons. The study aims to analyze alternative methods of coping with overcrowded. The method used in this study is descriptive with qualitative method as the primary data for researching. And for secondary data conducted a review of libraries and law no. 12 of 1995 on correctional as additional data. The results and conclusions obtained from this study that several basic principles are needed to implement the open prison operational program.

Keywords: *community based correction; overcrowded; coaching*

Abstrak

Kemunculan metode community based correction diawali dengan praktik hukuman pemenjaraan yang oleh banyak negara cenderung dilihat sebagai satu-satunya jenis penghukuman hingga semakin lama kondisi penjara semakin overcrowded dan justru membawa dampak lebih buruk bagi para pelaku. Kebutuhan akan pidana alternatif lainnya untuk menghindari lebih banyak lagi pembagunan penjara pada akhirnya melahirkan konsep CBC. Ditinjau dari data SMS lap ditjen PAS pada bulan maret 2020

jumlah penghuni lapas dan rutan di Indonesia mengalami oververcrowded, dengan jumlah penghuni 270.415 sedangkan kapasitasnya hanya 132.531. Hal ini membuktikan bahwa perlu dilakukan pidana alternatif untuk mengurangi jumlah penghuni lapas dan rutan. Community based correction merupakan metode alternatif non pemenjaraan yang bertujuan untuk membaurkan kembali pelaku ke dalam masyarakat, dengan kata lain pelaku tidak dipenjarakan melainkan menjalani hukumannya di tengah masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam proses pembinaan terpidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode alternatif mengatasi overcrowded. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif sebagai data primer untuk melakukan penelitian. Dan untuk data sekunder dilakukan tinjauan pustaka dan undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagai data tambahan. Hasil serta kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa diperlukan beberapa prinsip dasar untuk melaksanakan program operasional lapas terbuka.

Kata Kunci: community based correction; overcrowded; pembinaan

Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Siallagan, 2016). Sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam (Aditya, 2019). Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Syamsiah & Nggeboe, 2017).

Banyaknya pelanggaran hukum di Indonesia, dan sistem hukum di Indonesia yang menganut segala tindak pidana itu selalu dijatuhi hukuman penjara, dan kurang terilisasinya konsep CBC di Indonesia yang membuat kita selalu terpaku pada pidana penjara. (Sulhin, 2018), Munculnya ide pemenjaraan merupakan bentuk reaksi masyarakat terhadap kejahatan karena telah mengakibatkan kerugian.

Hal ini membuat overcrowded di Indonesia sangat tinggi dan sulit untuk diatasi. Hukum selalu berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna memperbaiki segala segi kehidupan manusia dan demi tercapainya tujuan nasional, tidak terkecuali dalam proses pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan ialah salah satu pranata hukum yang tidak bisa dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia (Setiawan, 2018). Lembaga pemasyarakatan sebagai garis depan pelaksanaan asas pengayoman merupakan wadah untuk mencapai tujuan sistem pembinaan yaitu reintegrasi sosial. Pembinaan dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran pemasyarakatan tersebut, maka dalam

undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Overcrowded merupakan masalah utama yang menjadi penghambat keberhasilan tujuan Pemasyarakatan (Fahriza, 2018). Overcrowded terjadinya karena sistem hukum di Indonesia yang selalu membuat pelanggar hukum harus di pidana penjara padahal masih ada alternatif lainnya. Banyak mantan narapidana yang menjadi residivis hal ini membuktikan pidana penjara bukan satu-satunya jalan untuk mengembalikan pelanggar hukum ke masyarakat melainkan masyarakat juga harus ikut ambil peran dalam proses pembinaan.

Grafik 1.
jumlah penghuni tahanan dan narapidana

Sumber: <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2016/month/12>

Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengalami kepadatan narapidana (Mulyono & Arief, 2016). Jumlah tahanan dan narapidana yang semakin meningkat setiap tahunnya terjadi di Indonesia, dengan banyaknya pelanggar hukum sangat berbanding terbalik dengan jumlah kapasitas lapas dan rutan yang hanya mampu menampung sebanyak 132.531 penghuni. Dari data di atas menunjukkan bahwa overcrowded terus bertambah setiap tahunnya dan membuktikan pada kita pemenjaraan bukan satu-satunya hal yang cara efektif untuk mengurangi overcrowded.

Negara tidak mampu menampung begitu banyak pelanggar hukum di Indonesia selain memakan banyak tempat dan juga memakan banyak biaya untuk biaya perawatan dan peminaan narapidana. (Ardianto, 2019), Indonesia mengalami "over capacity".

Overcrowded menyebabkan beberapa hak narapidana tidak dapat terpenuhi optimal (Firdaus, 2019). Selain itu, Overcrowded sangat merugikan negara, mulai dari ancaman keamanan dan ketertiban di lapas/rutan, pembinaan bagi narapidana yang kurang efektif di karenakan terlalu banyaknya narapidana yang tidak sesuai dengan jumlah petugas. Serta sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk pelayanan hak dan kewajiban tahanan dan narapidana.

Contoh kerugian negara dalam hal overcrowded di bidang keamanan dan ketertiban, bisa terjadi kerusakan, kebakaran serta pelarian. Di tahun 2018 rutan sialang bungkuk mengalami kerusakan salah satu penyebabnya adalah overcrowded, tahun 2019 terjadi juga kerusakan di lapas narkotika langkat, di lapas ini juga terjadi overcrowded dan di tahun 2020 di rutan kabanjahe juga mengalami kerusakan dan tidak bisa di pungkiri bahwa di rutan ini juga terjadi overcrowded. Begitu besar dana yang harus di keluarkan negara untuk membangun kembali lapas atau rutan yang sudah hancur dan masih banyak lagi lapas atau rutan yang mengalami overcrowded sehingga perlu di lakukan kajian mendalam dalam menangani overcrowded tersebut.

Kondisi-kondisi yang mendorong munculnya pemikiran tentang pemidanaan tidak berbentuk pemenjaraan dan pemidanaan yang di lakukan melalui sejumlah program pembinaan berbasis di masyarakat, atau yang kemudian di kenal dengan community based correction (CBC). CBC tidak terbatas pada alternatif pemenjaraan saja, tapi mendorong alternative terhadap pemidanaan itu sendiri. (Coyle et al., 2002) juga menjelaskan, bahwa masalah yang di hadapi oleh pemenjaraan telah mendorong pemikiran kearah alternative terhadap pemenjaraan. Sistem pemasyarakatan menganut filosofi reintegratif pada dasarnya sangat adatif terhdap CBC. Pemasyarakatan memandang pembinaan tidak hanya di lakukan di dalam lembaga, namun memerlukan fase tertentu diana narapidana berinteraksi dengan masyarakat hingga di integrasikan kembali. Integrasi dan reintegrasi adalah upaya yang dilakukan untuk memperbesar kemauan masyarakat untuk menerima kembali narapidana dan meminimalisir stigma, sehingga ketika bebas, mantan narapidana di harapkan dapat hidup kembali secara normal sebagai anggota masyarakat.

Pemenjaraan dengan tujuan rehabilitative dan reintegrasi tidak berarti kondidisi narapidana jauh lebih baik dari hanya sekedar mengurung. Karena tetap berhadapan dengan masalah kemampuan penjara dalam memberikan program rehabilitasi dan reintegrasi, beserta pemenuhan hak-hak minimum terpidana. Inilah yang kemudian mendorong munculnya pemikiran-pemikiran alternative terhadap pemenjaraan. Bila di lihat dari filsafat reintegratif yang menekankan pemulihan hubungan terpidana dengan masyarakat, penghukuman pada dasarnya dapat dilakukan di luar pemenjaraan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II B lubuk pakam dan subjek yang di teliti adalah narapidana, dengan menggunakan instrument pedomanan wawancara untuk menggali informasi yang lebih baik. Metode penilitiannya bersifat deskriptif dengan metode kualitatif sebagai data primer untuk melakukan penelitian. Dan untuk data sekunder dilakukan

tinjauan pustaka dan undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagai data tambahan. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara rinci fenomena overcrowded yang ada di lapas yang menjadi pokok permasalahan dan pembinaan narapidana berbasis masyarakat. Hasil penelitian setelah diidentifikasi, dikonstruksikan, disusun dan dianalisis menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori, asas-asas serta norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Tujuan Community based Correction

Community based correction adalah sebuah pidana alternatif yang bertujuan untuk perlindungan komunitas, proporsionalitas, rehabilitasi dan reintegrasi, restorasi dan keadilan komunitas, efektivitas pembiayaan. Penologi modern bercirikan dengan berkembangnya penjara sebagai bentuk pidana, yang berkembang seiring dengan munculnya gagasan negara modern, di mana telah ada pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dalam pemberian reaksi terhadap kejahatan berkembang yang disebut the administration of justice. Reaksi dilakukan oleh kekuasaan yang diberikan mandat untuk melakukannya, yaitu aparat penegakan hukum dan kekuasaan yudikatif. Perkembangan ini membuat bentuk penghukuman tidak lagi bersifat corporal (badaniah) yang cenderung tidak manusiawi dan sewenang-wenang, berbentuk pemenjaraan. Hakekat reintegrasi berupaya memulihkan konflik, maka penghukuman seharusnya dapat dilakukan di luar lembaga pemenjaraan (alternatif terhadap pemenjaraan), dengan mengembalikan pelaku kejahatan kepada masyarakat tanpa proses peradilan pidana (alternatif terhadap pidanaan). United Nation Office on Drugs and Crime/UNODC (2007) menjelaskan adanya sejumlah alasan yang melatarbelakangi munculnya pemikiran ke arah CBC, yaitu, kontra produktifnya pemenjaraan terhadap pelaku kejahatan yang sangat ringan serta bila yang melakukan adalah kelompok rentan; deprivasi yang dialami oleh terpidana; hingga mahalnya biaya pemenjaraan.

Perkembangan dalam instrumentasi hukum internasional pada dasarnya menegaskan perlunya pelaksanaan CBC, melalui perubahan-perubahan dalam sistem hukum nasional, yaitu dengan mendorong diaturnya pidana pokok lain, seperti pengawasan atau kerja sosial, serta mendorong diaturnya mekanisme non peradilan seperti kebijakan diversi dan keadilan restoratif.

Bentuk- Bentuk CBC :

1. Bila putusan pengadilan sebagai batas, maka CBC dapat di bedakan antara; alternatif pidanaan dengan alternatif pemenjaraan.
2. Kategori pertama adalah kebijakan yang diberikan tanpa melalui putusan pengadilan, CBC berupaya menghindarkan seseorang dari pidana.

3. Sementara kategori kedua adalah CBC yang diberikan setelah diputus bersalah oleh pengadilan, sbg alternatif pemenjaraan.
4. Dua bentuk alternatif terhadap pidanaaan adalah diversi dan keadilan restoratif.

Beberapa bentuk alternatif terhadap pemenjaraan adalah hukuman percobaan (probation), kerja sosial, denda, pembebasan bersyarat, dan sejumlah program pembinaan yang berbasis masyarakat seperti boot camp, dan half way house. Penjara terbuka, meski masih disebut sebagai penjara, namun secara konseptual dan praktek juga merupakan contoh dari alternatif terhadap pemenjaraan. Bentuk fisik penjara yang tidak menitikberatkan aspek keamanan serta keleluasaan yang diterima oleh narapidana dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Dalam perkembangannya CBC memang lebih banyak diterapkan pada kejahatan-kejahatan kategori ringan dan non kekerasan. Terhadap kejahatan-kejahatan serius, seperti terorisme, pembunuhan, dan korupsi, penerapannya akan berhadapan dengan dengan rasa keadilan masyarakat. Terkait dengan aspek keamanan karena CBC adalah kebijakan yang pelaksanaannya berbasis di masyarakat sementara berdasarkan subjek (pelaku), CBC lebih banyak diwacanakan bagi anak, perempuan, dan kelompok rentan. CBC adalah kebijakan yang tepat bagi anak karena pidanaaan dan pemenjaraan justru lebih banyak memberikan efek negatif, dengan memperburuk kondisi anak serta besarnya potensi pembelajaran kejahatan.

Terhadap perempuan, CBC dianggap tepat karena banyak kejahatan yang dilakukan oleh perempuan justru dilatarbelakangi oleh penderitaan yang dialaminya sendiri, seperti korban kekerasan fisik maupun psikologis yang melakukan kekerasan terhadap suami. Banyak pula kejahatan yang dilakukan perempuan hanya karena ia memiliki hubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki. Ini yang menjadi dasar mengapa CBC dianggap tepat karena pemenjaraan tidak akan mampu menyelesaikan masalah paling esensial dari mengapa kejahatan terjadi.

Pelaksanaan CBC di Masyarakat

CBC bagi masyarakat akan memberikan sejumlah dampak positif. Pertama, berkurangnya beban jumlah narapidana dan tahanan yang berada di dalam lapas dan rutan. Beban yang semakin meningkat pada aspek jumlah warga binaan, keterbatasan SDM, dana, dan sarana prasarana, maka masyarakat perlu memikirkan tentang penerapan CBC. Meski masih terbatas pada pembebasan bersyarat atau program-program di luar penjara yang intinya mendekatkan dan memulihkan ikatan sosial. Kedua, terkait filosofi masyarakat, upaya reintegratif akan lebih besar potensi tercapainya bila pembinaan dilakukan berbasis di masyarakat.

Pelaksanaan CBC akan selalu berhadapan dengan sejumlah hambatan. Pertama, CBC menuntut pemahaman serta sinkronisasi kerja antar lembaga lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Kewenangan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sangat besar untuk memidanakan atau tidak seseorang, dan mengembalikannya kepada masyarakat. Tanpa dukungan dari sub sistem peradilan pidana yang lain, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan; dan pengadilan, CBC hanya akan terbatas pada apa yang diterapkan oleh sistem masyarakatan. Kedua, karena berada dalam lingkup peradilan pidana, maka kebijakan CBC terbentur oleh payung hukum. Bila pidana kerja sosial, pidana pengawasan, belum dinyatakan sebagai bagian dari pidana pokok di dalam KUHP, maka pengadilan akan memiliki pilihan yang sangat terbatas, selain hanya memenjarakan dan menyerahkan pelaksanaan pidana kepada lapas. Hukum acara pidana, menegaskan pertimbangan untuk tidak melanjutkan sebuah kasus ke peradilan pidana bila pelaku adalah kategori anak atau lanjut usia. Dalam sistem masyarakatan, payung hukum, serta kebijakan kebijakan teknis yang menegaskan pentingnya pelaksanaan CBC juga di periuikan.

Pelaksanaan Program Operasional Lapas Terbuka

Untuk mencapai hal-hal yang dikemukakan di atas, maka menurut Mc.Carthy²⁰ diperlukan petunjuk operasionalisasi halfway house yang menyangkut issue-isue yang berhubungan dengan pemilihan peserta (target population selection), pemilihan lokasi (location and system selections) petugas pelatihnya (personel and training), pelayanan pembinaan (treatment service), dan keamanan (security).

Faktor Wilayah (Geographic Location)

Wilayah tersebut cakupannya cukup luas dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda dan sangat beragam, keragaman ini mencakup dalam hal, jenis mata pencaharian, jenis keterampilan, misalnya di bidang industri, bidang pertanian, dan lain- lain. Di samping itu terdapat keragaman pada sifat wilayah itu sendiri, daerah urban/perkotaan atau pedesaan. Menurut hasil penelitian hal tersebut sulit untuk dapat dipenuhi, disebabkan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara lain faktor wilayah lapas terbuka jakarta wilayah cakupannya terlalu luas dengan karakteristik dengan wilayahnya yang sangat beragam, baik dalam mata pencaharian ataupun sifat wilayahnya itu sendiri. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketidak cocokan antara karakteristik warga binaannya dengan pelayanan pembinaan jenis keterampilan yang sudah tersedia. Jenis keterampilan kerja yang tersedia adalah sebagian besar jenis keterampilan pada masyarakat pedesaan, sedangkan sebagian besar narapidana yang dibinanya dari daerah perkotaan.

Faktor Usia (Age)

Faktor usia narapidana yang akan ditempatkan di lapas terbuka jakarta merupakan faktor yang penting, usia narapidana harus diseleksi sedemikian rupa, tujuannya jika narapidana yang usianya terlalu muda ada kemungkinan akan mengalami kesulitan memasuki dunia kerja, sedangkan narapidana yang usianya terlalu tua akan mengalami kesulitan pada jenis pekerjaan yang sesuai dengan narapidananya yang luas ada di masyarakat. Kewenangan menyeleksi narapidana lapas terbuka jakarta tidak mempunyai wewenang atau memilih siapa saja narapidana yang akan menjadi warga binaannya. Dalam hal ini proses penerimaannya (referral), lapas terbuka jakarta bersifat pasif, artinya menerima siapa pun narapidana yang dikirim oleh lapas-lapas tertutup yang berada di wilayah jakarta, bogor, tanggerang dan bekasi (Jabotabek).

Jenis Kelamin (Sex)

Menurut McCarthy, jenis kelamin merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan, hal tersebut guna untuk dapat memastikan bahwa disana cukup penghuni (warga binaan) untuk mencapai tujuan halfway house. Penempatan narapidana berdasarkan dari jenis kelamin (sex) dapat disimpulkan bahwa, dalam lapas terbuka jakarta saat ini belum bisa mengakomodir pembinaan narapidana perempuan, yang disebabkan beberapa hal diantaranya, menyangkut jumlah narapidana perempuan yang masih relatif sedikit, faktor keamanan yang kurang memadai, faktor pembinaan pelayanan yang belum mencukupi, dan faktor sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan standar internasional (Standard Minimum Rules/SMR).

Waktu Tinggal Narapidana (Length of Stay)

Lamanya waktu tinggal berdasarkan sisa masa tahanan yang dijalani, dapat menentukan peserta di lapas terbuka, lamanya waktu tinggal harus disesuaikan dengan program yang ada di lapas terbuka. Karena seorang narapidana yang hanya memiliki sisa hukuman 3 (tiga) bulan saja tidak cocok tinggal di lapas terbuka karena tidak dapat mengambil keuntungan dari program yang memerlukan jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun. Oleh karena itu diperlukan ketentuan batas minimum waktu tinggal di lapas terbuka harus disesuaikan dengan program yang ada. Di dalam lapas terbuka jakarta sasaran dan tujuan sudah ditetapkan, namun sasaran dan tujuan tersebut masih bersifat umum belum spesifik sehingga akan sulit untuk menentukan ukuran keberhasilan dan menentukan waktu pencapaiannya. Penentuan tujuan dan sasaran program masih sangat umum, pada gilirannya akan menyulitkan pihak lapas terbuka dalam menentukan berapa waktu tinggal (length of stay) minimum dari narapidana yang akan ditetapkan di dalamnya. Dikatakan pula oleh sumber yang sama pada pihak lapas terbuka jakarta menemui kesulitan untuk menentukan metode dan strategi, pencapaian

serta pengukuran tingkat keberhasilan pembinaan sebagai bahan evaluasi ke depan.

Faktor Narapidana yang Membahayakan

Narapidana yang membahayakan, emosional tidak dianjurkan untuk menjadi peserta pada lapas terbuka, alasannya dapat membahayakan yang lainnya ataupun masyarakat. Penempatan narapidana di lapas terbuka jakarta telah dilakukan secara selektif, artinya telah dilakukan pembatasan narapidana dengan jenis pidana apa saja yang dapat dibina di lapas terbuka jakarta. Berkaitan dengan jenis pidananya, penempatan narapidana di lapas terbuka jakarta, telah dilakukan secara selektif, artinya pihak lapas terbuka harus memperhatikan bahwa narapidana ini tidak akan berbahaya apabila telah di berikan asimilasi.

Metode Pembinaan Narapidana melalui Community Based Correction di Masa Akan Datang

Kedudukan lapas terbuka sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana dapat diperoleh gambaran bahwa lapas terbuka berbeda dengan lapas pada umumnya (lapas tertutup), karena lapas terbuka hanya mengambil sebagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab dari lapas tertutup. Selain itu lapas terbuka mengedepankan pembinaan Community Based Corrections, atau pembinaan yang melibatkan masyarakat, lebih kekeluargaan, dan dengan pengamanan yang minimum (minimum security) serta tanpa adanya jeruji besi seperti lapas tertutup. Lapas terbuka merupakan lapas yang secara khusus membina narapidana untuk dikembalikan ke masyarakat melalui tahap asimilasi. Jadi lapas terbuka hanya mengkhususkan bagi narapidana yang telah mencapai tahapan pembinaan ketiga berdasarkan surat edaran kepala direktorat pemasyarakatan No. Kp 10.13/3/1 tanggal 8 februari 1965, yaitu tahap keamanan yang minimal sampai batas 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap ini diharapkan narapidana sudah menunjukan kemajuan positif baik mental maupun spiritual serta keterampilan lainnya, dan yang paling penting telah siap untuk berasimilasi dengan masyarakat. Secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut: pembentukan lapas terbuka di indonesia merupakan model yang perlu dikembangkan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan di masa yang akan datang, mengingat keberadaan lapas terbuka yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan..

Kesimpulan

CBC adalah suatu progam yang menjauhkan terpidana dari tindak pidana penjara untuk meminimalisir terjadinya overcrowded, di indonesia sudah dilakukan yaitu pidana alternative dengan cara bagi para pengguna narkoba tidak harus di pidana penjara tetapi dapat di rehabilitasi. Dengan memberikan

asimilasi bagi narapidana membuat overcrowded lebih teratasi, dan dapat bekerja di lapas terbuka dan bisa juga di pekerjaan dengan pihak ketiga sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Diperlukan beberapa prinsip dasar untuk melaksanakan program operasional lapas terbuka: prinsip pertama narapidana harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, prinsip kedua narapidana harus diseleksi terlebih dahulu, prinsip ketiga narapidana tidak boleh dieksploitasi, prinsip keempat sistem pengamanan harus minimum, dan prinsip kelima tanggung jawab pemindahan narapidana. Berdasarkan beberapa prinsip tersebut di atas dalam operasionalisasi di lapas belum sepenuhnya dapat menerapkan prinsip tersebut, yang sudah dapat dipenuhi adalah prinsip kedua yaitu narapidana sudah diseleksi dengan ketat, prinsip ketiga yaitu narapidana tidak dieksploitasi, prinsip keempat yaitu sistem pengamanan, sistem pengamanan sudah menerapkan standar minimum. Sedangkan prinsip yang pertama dan utama yaitu narapidana dapat memiliki pekerjaan pada pihak ketiga (swasta) belum dapat terpenuhi. Keberhasilan proses pembinaan narapidana, ditentukan oleh beberapa aspek antara lain aspek narapidana, aspek petugas lapas, dan aspek masyarakat. Dalam rangka memberdayakan lapas terbuka di masa yang akan datang, perlu diperhatikan peran serta masyarakat dan peran serta pihak swasta, untuk mengoptimalkan narapidana dapat bekerja pada pihak swasta setelah bebas nanti. Perlu ada keyakinan bahwa narapidana bukan orang jahat, dan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta dapat mengembangkan potensi-potensi narapidana itu sendiri.

Bibliografi

- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37–54.
- Ardianto, A. (2019). *Pembebasan Bersyarat sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Narapidana dan Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Makassar)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Coyle, P., Philcox, J. C., Carey, L. C., & Rofe, A. M. (2002). Metallothionein: the multipurpose protein. *Cellular and Molecular Life Sciences CMLS*, 59(4), 627–647.
- Fahriza, R. (2018). Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Overcrowded Di Lembaga Pemasyarakatan. *Reformasi Hukum*, 24(2), 130–149.
- Firdaus, I. (2019). Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 339–358.
- Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). Upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Law Reform*, 12(1), 1–16.
- Setiawan, R. (2018). *Penerapan Asas-Asas Pembinaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro*. Universitas Muhammadiyah Metro.

- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122–128.
- Sulhin, I. (2018). *Diskontinuitas Penologi Punitif*. Prenada Media.
- Syamsiah, S., & Nggeboe, F. (2017). Kajian Yuridis Mengenai Pembinaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia Di Lapas Klas Ila Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(3), 177–217.